

## **Determinan *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Sumatera**

**Marina Nalviantry, Rosy Armaini, Riza Wahyudi**

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

marinanalviantry@gmail.com, rosyarmaini@polsri.ac.id, rizawahyudi70@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the alignment of spending, budgetary solvency ratio, and growth ratio on the financial distress of provincial governments in Sumatra. The research employs a quantitative approach. The sampling method used is a saturated sampling technique, which includes all provincial governments in Sumatra. The type of data used is secondary data, obtained through documentation techniques in the form of audited financial statements, namely audit reports from 2019 to 2023. The analytical method applied is panel data regression analysis using the E-Views 12 software. The partial test results show that alignment of spending and the budgetary solvency ratio have a negative and significant effect on financial distress. The simultaneous test results indicate that expenditure alignment, budgetary solvency ratio, and growth ratio collectively have a significant effect on financial distress*

**Keywords:** *Alignment of Spending; Budgetary Solvency Ratio; Growth Ratio; Financial Distress.*

### **ABSTRAK**

Adapun tujuannya dari penelitian ini guna diketahui pengaruh dari keselarasan belanja, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di Sumatera. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh yaitu seluruh pemerintah provinsi di Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik dokumentasi berupa laporan keuangan pemerintah provinsi yang telah di audit yaitu laporan hasil pemeriksaan tahun 2019-2023. Analisis yang digunakan ini yaitu model regresi data panel dengan melalui bantuan aplikasi E-Views 12. Temuan ini mengungkapkan bahwa keselarasan belanja dan *budgetary solvency ratio* mempunyai pengaruh negatif maupun signifikan pada *financial distress*. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa keselarasan belanja, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan mempunyai pengaruh dengan signifikan terhadap *financial distress*.

**Kata kunci:** *Keselarasan Belanja; Budgetary Solvency Ratio; Rasio Pertumbuhan; Financial Distress.*

### **PENDAHULUAN**

Keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, Indonesia memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi untuk mengelola anggaran dan kebijakan fiskal. Sejak tahun 2001, Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah, yang secara yuridis ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6), di mana otonomi daerah dimaknai sebagai hak, otoritas, maupun tanggung jawab yang diberikan kepada

pemerintah daerah untuk mengelola serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan publik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023, jumlah total entitas yang dijadikan objek survei dalam rangka penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik mencapai 586 unit. Entitas tersebut mencakup 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, serta 415 pemerintah kabupaten. Dari keseluruhan entitas tersebut, sebanyak 414 (70,70%) tergolong dalam zona hijau, 133 (22,66%) termasuk dalam zona kuning, dan 39 (6,64%) berada pada zona merah. Pada level pemerintahan provinsi, dari 34 provinsi yang menjadi objek pengamatan, 26 berhasil masuk zona hijau, sementara 6 tercatat berada di zona kuning, dan hanya 2 yang dikategorikan dalam zona merah. Adapun tiga provinsi dengan skor tertinggi dalam kategori ini yaitu Sulawesi Utara dengan capaian nilai 97,18; Jawa Barat memperoleh skor 96,77 dan Provinsi Bali mencatatkan angka 96,46. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada satupun pemerintah provinsi di Sumatera yang berhasil mencapai tiga peringkat teratas dalam kategori kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, bahkan Provinsi Lampung hanya memperoleh nilai 65,58 dan tergolong dalam kategori zona kuning. Hal ini mencerminkan bahwasanya kualitas pelayanan publik di sejumlah pemerintah provinsi di Sumatera masih belum optimal dan belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Syarifah *et al.* (2023:359), ketika kualitas pelayanan publik berada pada level yang rendah, kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Keadaan ini mengindikasikan bahwasanya pemerintah belum mampu memenuhi tanggung jawab dalam hal pengalokasian dana infrastruktur guna menunjang pelayanan publik yang memenuhi standar mutu minimal, yang disebabkan oleh kondisi keuangan pemerintah yang berada dalam situasi tidak stabil. Syarifah *et al.* (2023:359) menyatakan bahwasanya belanja modal mempunyai peranannya yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, mengingat besarnya alokasi anggaran untuk belanja modal akan memengaruhi pembangunan dalam rangka penyediaan layanan yang layak. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, salah satu target kebijakan pembangunan ialah menetapkan proporsi minimal belanja modal sebesar 30% dari total anggaran belanja daerah pada setiap provinsi.

Pada tahun 2023, rerata belanja modal yang direalisasikan oleh pemerintah provinsi di wilayah Sumatera hanya mencapai 17,1%, yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pemerintah provinsi di kawasan tersebut yang berhasil memenuhi proporsi belanja modal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dwitayanti *et al.* (2020:138) mengemukakan jika rendahnya realisasi belanja modal tersebut disebabkan oleh dominannya penggunaan anggaran daerah untuk membiayai pos belanja lainnya, seperti belanja operasi yang mencakup pengeluaran pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, serta transfer

daerah berupa bagi hasil dan bantuan keuangan. Ketimpangan alokasi ini dapat menjadi salah satu pemicu timbulnya *financial distress* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Jones & Walker (2007) dalam Fatmawati et al. (2023:63) mengartikan *financial distress* sebagai kondisi ketika pemerintah tidak sanggup menyelenggarakan pelayanan publik yang memenuhi standar kualitas pelayanan yang telah ditentukan. Sari & Arza (2019:1427) *financial distress* terjadi karena kurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk diinvestasikan pada infrastruktur publik.

Jones & Walker (2007) dalam Syarifah et al. (2024:359) mengemukakan bahwasanya dalam pemerintahan, *financial distress* pada negara bagian di Australia dapat diprediksi melalui dua jenis indikator, yakni indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan meliputi jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur layanan publik serta berbagai rasio yang mencerminkan kinerja keuangan pemerintah. Besaran dana tersebut mencerminkan prioritas dan kemampuan fiskal pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik di antaranya jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. Alokasi dana yang terlalu kecil bisa mengindikasikan lemahnya komitmen pelayanan atau keterbatasan anggaran, sebaliknya jika alokasi dana terlalu besar namun tanpa perencanaan yang baik, maka dapat menjadi beban anggaran dan memicu *financial distress*. Indikator non-keuangan terbagi atas karakteristik dewan dan kualitas pelayanan publik. Karakteristik dewan mencakup berbagai aspek seperti latar belakang pendidikan anggota dewan, stabilitas politik dan partisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran, sedangkan kualitas pelayanan publik mencerminkan efektivitas dan kepuasan masyarakat pada layanan yang diberikan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan keamanan, penurunan kualitas bisa mengindikasikan adanya tekanan anggaran atau pengelolaan anggaran yang buruk.

Penelitian ini merupakan perluasan dari karya Syarifah et al. (2023) yang mengkaji berbagai faktor yang mempunyai pengaruhnya atas *financial distress* pada tingkat pemerintah provinsi di wilayah Sumatera dan memiliki unsur berbeda yaitu keselarasan belanja dan rasio pertumbuhan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai jenis data yang digunakan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan sumber berupa laporan keuangan pemerintah provinsi di Sumatera untuk periode 2019 hingga 2023. Seluruh pemerintah provinsi yang ada di wilayah Sumatera, sebanyak 10 provinsi, dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini. Teknik sampling yang digunakan yaitu sampling jenuh, di mana seluruh elemen populasi

dijadikan sebagai sampel, yaitu laporan keuangan pemerintah provinsi selama lima tahun, sehingga menghasilkan total sebanyak 50 sampel. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak E-Views 12.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif**

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Sample: 2019 2023

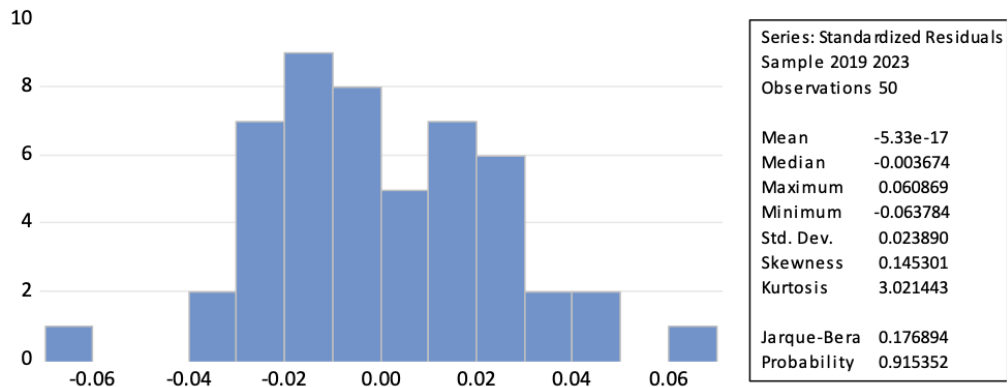
	Y	X1	X2	X3
Mean	0.151124	1.476681	0.996435	0.065640
Median	0.151623	1.343567	0.993190	0.054119
Maximum	0.237893	2.655990	1.192514	0.381942
Minimum	0.086289	0.711114	0.814759	-0.173301
Std. Dev.	0.032944	0.480625	0.062939	0.122175
Skewness	0.032448	0.710702	0.053603	0.391098
Kurtosis	2.690718	2.791504	4.543653	2.559111
Jarque-Bera Probability	0.208056 0.901200	4.299705 0.116501	4.988245 0.082569	1.679615 0.431794
Sum	7.556221	73.83406	49.82173	3.282002
Sum Sq. Dev.	0.053180	11.31901	0.194102	0.731414
Observations	50	50	50	50

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh bahwasanya nilai minimum keselarasan belanja berada pada angka 0,71, sedangkan nilai maksimumnya mencapai 2,65, dengan nilai rerata 1,47 dan standar deviasi sebesar 0,48. Untuk *budgetary solvency ratio*, nilai terendah tercatat 0,81, nilai tertinggi sebesar 1,19, dengan rerata sebesar 0,99 serta standar deviasi sebesar 0,06. Sementara itu, rasio pertumbuhan menunjukkan nilai minimum sebesar -0,17, nilai maksimum 0,38, rata-rata 0,06, dan standar deviasi sebesar 0,12.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**  
 Sumber: Data diolah penulis (2025)



Sebagaimana tabel di atas, hasil uji normalitas didapatkan nilai *Jarque-Bera* (JB) sebesar 0,176894 dan nilai *probability* sebesar 0,915352. Nilai *probability*  $JB > \alpha$  ( $0,915352 > 0,05$ ), maka disimpulkan bahwasanya data berdistribusi dengan normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 3. Hasil Uji Multikoliniearitas**  
 Sumber: Data diolah penulis (2025)

Variance Inflation Factors  
 Date: 06/19/25 Time: 21:50  
 Sample: 1 50  
 Included observations: 50

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.003756	308.9337	NA
X1	6.10E-05	12.07631	1.135801
X2	0.004267	349.7588	1.362188
X3	0.001022	1.591381	1.229302

Sebagaimana tabel di atas, hasil uji multikolinearitas didapatkan nilai VIF keselarasan belanja sebesar 1,135801, *budgetary solvency ratio* sebesar 1,362188 dan rasio pertumbuhan sebesar 1,229302. Ketiga variabel independen mempunyai nilai  $VIF < 10$ , maka disimpulkan bahwasanya variabel keselarasan belanja, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan tidak mengalami gejala multikolinearitas dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.450350	Prob. F(3,46)	0.7183
Obs*R-squared	1.426633	Prob. Chi-Square(3)	0.6993
Scaled explained SS	1.171807	Prob. Chi-Square(3)	0.7598

Merujuk pada Tabel 4, diketahui bahwasanya nilai obs R-squared mencapai 1,426633, sedangkan nilai prob. Chi-Square tercatat 0,6993. Karena nilai prob. Chi-Square > sig. 0,05 (0,6993 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam data tersebut.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Mean dependent var	-0.000324
S.D. dependent var	0.040605
Akaike info criterion	-4.380590
Schwarz criterion	-4.226156
Hannan-Quinn criter.	-4.321998
Durbin-Watson stat	2.237592

Berdasarkan tabel 5, uji autokorelasi hasil penelitian menunjukkan nilai Durbin-Watson senilai 2,2375 yang menunjukkan nilai DW lebih besar dari nilai DU atau bisa diartikan dengan  $DU < DW < 4-DU = 1,6739 < 2,237592 < 2,3261$ , maka disimpulkan bahwasanya nilai  $DW > DU$  ( $DW > DU = 2,237592 > 1,6739$ ) yang artinya bahwasanya data tidak terjadi autokorelasi.

### Pengujian Regresi Data Panel

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Data Panel**

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.382085	0.061289	6.234176	0.0000
X1	-0.034031	0.007811	-4.357022	0.0001
X2	-0.181346	0.065318	-2.776331	0.0079
X3	-0.000134	0.031965	-0.004179	0.9967

Persamaan regresi data panel menjelaskan nilai konstanta 0,382085 menunjukkan bahwasanya variabel independen dianggap konstan 0 maka akan

bernilai positif pada variabel *financial distress* 0,382085. nilai kinerja keuangan sebesar 1,790. Nilai koefisien keselarasan belanja (X1) senilai -0,034031 artinya setiap peningkatan 1% variabel tersebut maka akan menurunkan *financial distress* sebesar 0,034031. Koefisien *budgetary solvency ratio* (X2) sebesar -0,181346 menunjukkan setiap peningkatan 1% variabel tersebut maka *financial distress* menurun sebesar 0,181346. Koefisien rasio pertumbuhan (X3) senilai -0,000134 menunjukkan setiap peningkatan 1% variabel tersebut maka *financial distress* menurun -0,000134. Sebagaimana tabel di atas, didapatkan persamaan regresi data panel yang diadopsi sebagai berikut:

$$Y = 0,382085 - 0,034031 - 0,181346 - 0,000134 + e$$

**Pengujian Hipotesis**

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menggambarkan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> berkisar antara 0 -1. Jika R<sup>2</sup> bernilai rendah, hal tersebut mencerminkan bahwasanya independen hanya memberikan kontribusi yang terbatas dalam menjelaskan fluktuasi dependen. Sebaliknya, apabila nilai R<sup>2</sup> mendekati angka 1, maka hal itu menunjukkan bahwasanya independen memiliki kapasitas yang tinggi dalam menjelaskan hampir seluruh perubahan yang terjadi pada dependen dalam model yang digunakan.

**Tabel 7. Hasil Uji R<sup>2</sup>**  
 Sumber: Data diolah penulis (2025)

R-squared	0.474136	Mean dependent var	0.151124
Adjusted R-squared	0.439840	S.D. dependent var	0.032944
S.E. of regression	0.024657	Akaike info criterion	-4.490927
Sum squared resid	0.027966	Schwarz criterion	-4.337965
Log likelihood	116.2732	Hannan-Quinn criter.	-4.432678
F-statistic	13.82502	Durbin-Watson stat	1.145564
Prob(F-statistic)	0.000001		

Hasil tabel di atas menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi senilai 0,439840 artinya mencerminkan bahwasanya keseluruhan independen memberikan pengaruhnya pada dependen sebesar 43,98%, sedangkan 56,02% sisanya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

**Uji Simultan (Uji Statistik F)**

**Tabel 8. Hasil Uji Simultan (F)**  
 Sumber: Data diolah penulis (2025)

R-squared	0.474136	Mean dependent var	0.151124
Adjusted R-squared	0.439840	S.D. dependent var	0.032944
S.E. of regression	0.024657	Akaike info criterion	-4.490927
Sum squared resid	0.027966	Schwarz criterion	-4.337965
Log likelihood	116.2732	Hannan-Quinn criter.	-4.432678
F-statistic	13.82502	Durbin-Watson stat	1.145564
Prob(F-statistic)	0.000001		

Hasil Uji F didapatkan hasil  $F_{hitung}$  sebesar 13,82502 dengan signifikansi sebesar 0,000001. Hal ini berarti  $F_{hitung} 13,82502 > F_{tabel} 2,81$  dan tingkat signifikansi  $0,000001 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwasanya keselarasan belanja, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

**Uji Parsial (Uji T)**

**Tabel 9. Hasil Uji Parsial (T)**  
 Sumber: Data diolah penulis (2025)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.382085	0.061289	6.234176	0.0000
X1	-0.034031	0.007811	-4.357022	0.0001
X2	-0.181346	0.065318	-2.776331	0.0079
X3	-0.000134	0.031965	-0.004179	0.9967

Hasil pengujian untuk uji t berdasarkan tabel 9, maka dihasilkan variabel keselarasan belanja memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $-4,3570 > t_{tabel} -2,013$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,0001 < 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwasanya variabel keselarasan belanja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Variabel *budgetary solvency ratio* memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,7763 > t_{tabel} -2,013$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,0079 < 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwasanya variabel *budgetary solvency ratio* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Variabel rasio pertumbuhan memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,0041 < t_{tabel} -2,013$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,9967 < 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwasanya variabel rasio pertumbuhan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap *financial distress*.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Keselarasan Belanja Terhadap *Financial Distress***

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya keselarasan belanja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ketika keselarasan belanja meningkat dengan memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal, hal tersebut mencerminkan bahwasanya pemerintah provinsi di Sumatera mampu menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah, terutama dalam mengalokasikan sumber daya ke belanja rutin dan belanja pembangunan, menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pemerintah provinsi yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya fiskalnya secara optimal terutama dengan menjaga keselarasan antara belanja rutin dan pembangunan akan memiliki ketahanan fiskal yang lebih kuat dan risiko *financial distress* yang lebih rendah serta pelayanan publik yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Illahi *et al.*, (2021) yang menunjukkan hasil keselarasan belanja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*.

### **Pengaruh *Budgetary Solvency Ratio* Terhadap *Financial Distress***

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya *budgetary solvency ratio* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. *Budgetary solvency ratio* yang tinggi mencerminkan bahwasanya pemerintah provinsi di Sumatera sebagai telah mengelola keuangan secara optimal dengan tidak melakukan belanja melebihi pendapatan yang tersedia. Pengelolaan anggaran yang sehat dan seimbang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Ketika anggaran dikelola secara optimal dan mampu memenuhi kebutuhan belanja tanpa menimbulkan defisit, maka daerah memiliki ketahanan fiskal yang lebih baik dan mampu menghindari kondisi *financial distress* serta memiliki kapasitas untuk membiayai pelayanan publik serta pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan. Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syarifah *et al.*, (2023) yang menyatakan hasil bahwasanya *budgetary solvency ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*.

### **Pengaruh Rasio Pertumbuhan Terhadap *Financial Distress***

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya rasio pertumbuhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini disebabkan karena kondisi dimana pertumbuhan PAD yang dialami oleh pemerintah provinsi di Sumatera relatif kecil dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 hampir semua pemerintah provinsi di Sumatera mengalami penurunan PAD yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwasanya ekspektasi masyarakat sebagai prinsipal terhadap agen belum sepenuhnya terpenuhi dalam membiayai kebutuhan

pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah provinsi di Sumatera belum mampu mengelola dan memanfaatkan PAD secara optimal sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat memperkuat bukti bahwasanya PAD belum menjadi penggerak utama dalam mendukung pembiayaan belanja untuk kepentingan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjani *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwasanya rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

### **Pengaruh Keselarasan Belanja, *Budgetary Solvency Ratio* dan Rasio Pertumbuhan Terhadap *Financial Distress***

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwasanya keselarasan belanja, *budgetary solvency ratio*, dan rasio pertumbuhan secara bersama-sama memiliki pengaruhnya yang signifikan pada *financial distress*. Kondisi ini merefleksikan bahwasanya ketika ketiga variabel independen tersebut dikelola secara proporsional dan efektif, maka hal tersebut mencerminkan bahwasanya pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal. Hasil ini selaras dengan temuan Eliza *et al.* (2024), yang menyatakan bahwasanya secara kolektif, kemandirian keuangan, rasio efisiensi (LCO), rasio solvabilitas anggaran (BSR), dan rasio pertumbuhan berperan dalam memprediksi terjadinya *financial distress*. Penelitian lain oleh Rusdi & Fuad (2018) juga mendukung hasil ini, di mana disebutkan bahwa kemandirian keuangan, keselarasan belanja, dan rasio pertumbuhan PAD secara simultan berpengaruh terhadap *financial distress*.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulannya dari penelitian ini secara parsial keselarasan belanja dan *budgetary solvency ratio* mempunyai pengaruhnya dengan negatif maupun signifikan pada *financial distress* sedangkan rasio pertumbuhan tidak mempunyai pengaruhnya pada *financial distress*. Secara simultan keselarasan belanja, *budgetary solvency ratio* maupun rasio pertumbuhan mempunyai pengaruhnya dengan signifikan terhadap *financial distress*.

Saran yang dapat direkomendasikan untuk pemerintah provinsi di Sumatera adalah agar dapat memperhatikan keselarasan belanja, *budgetary solvency ratio* dan rasio pertumbuhan agar dapat menurunkan potensi terjadinya *financial distress* serta dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik dan optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dwitayanti, Y., Armaini, R., & Aprianti, S. (2020). Analisis Pengaruh Budgetary Solvency Ratio terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(2), 137-144.

Eliza, I., Masnila, N., & Dwitayanti, Y. (2024). Analisis Pengaruh Solvabilitas dan

Derajat Desentralisasi terhadap Financial Distress Provinsi di Indonesia.  
*Jurnal Media Akuntansi*, 7(1), 117-130.

Fatmawati, N., Andriana, & Wardhaningrum, O. A. (2023). Pengaruh Rasio Keuangan dalam Memprediksi Financial Distress di Provinsi Jawa timur. *Accounting Research Journal*, 3(1), 62-76.

Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017. *Pareso Jurnal*, 3(3), 543-556.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019. (2015). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Ombudsman Republik Indonesia. (2024, March 11). [*Judul dokumen tidak tersedia*] [PDF]. Diakses 17 Maret 2025, dari [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/897/SUB\\_LT\\_5alea951d55c4\\_file\\_202403114\\_13441.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/897/SUB_LT_5alea951d55c4_file_202403114_13441.pdf)

Rusdi, D., & Fuad, k. (2018). Metode Prediksi Financial Distress di Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah untuk Mengukur Kesejahteraan Umat. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 13-24.

Sari, M. E., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425-1436.

Syarifah, A., Masnila, N., & Indriasari, D. (2023). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7, 358-368.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.